

Policy Brief

ANCAMAN DI BALIK SCROLL ANAK

STRATEGI PENGUATAN LITERASI DAN KEAMANAN DIGITAL

Oktober 2026

Rekomendasi ditujukan ::

- Kementerian Komdigi;
- Kemendikdasmen;
- Guru; dan Orangtua

Oleh,
Bayu Hikmat Purwana**EXECUTIVE SUMMARY**

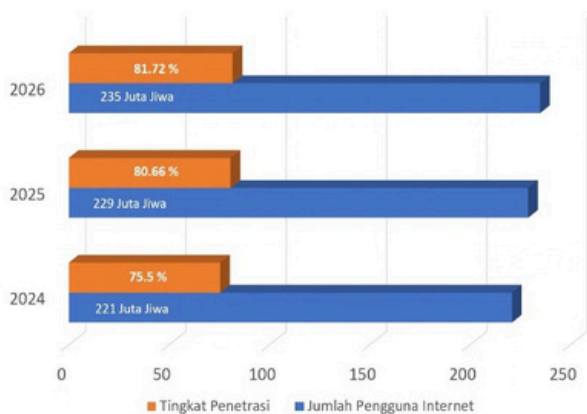
Tingginya akses internet anak Indonesia (99,4%) dengan rata-rata penggunaan 5,4 jam/hari tidak sejalan dengan kapasitas perlindungannya; hanya 37,5% yang teredukasi keamanan daring, dan sekitar 2% anak pengguna internet mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual secara daring. Analisis USG, *Fishbone*, dan akar masalah mengonfirmasi rendahnya literasi digital anak dan orang tua sebagai isu prioritas, yang dipicu oleh minimnya kapasitas individu, pola pengasuhan digital yang belum optimal, serta adanya fragmentasi tata kelola perlindungan. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi yang diajukan adalah Penguatan Literasi dan Kompetensi Keamanan Digital Anak, Orang Tua, dan Guru. Kebijakan ini diimplementasikan melalui edukasi berbasis usia, *digital parenting*, pelatihan guru, serta integrasi sistem deteksi dan pelaporan guna mewujudkan ekosistem digital anak yang aman, adaptif, dan berkelanjutan.



1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara anak belajar, berkomunikasi, mencari informasi, dan bersosialisasi. Perubahan tersebut berlangsung semakin cepat seiring dengan meluasnya akses internet dan penggunaan berbagai perangkat digital untuk pendidikan, hiburan, komunikasi, maupun interaksi sosialnya.

Fenomena tersebut menjadi semakin penting dalam konteks Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar. Indonesia memiliki lebih dari 275 juta penduduk, dengan lebih dari 80 juta di antaranya merupakan anak-anak atau sekitar sepertiga dari total penduduk. Besarnya populasi anak tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekosistem digital memiliki implikasi luas terhadap kehidupan dan perkembangan generasi muda.



Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJI) Indonesia (2024) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai sekitar 221 juta jiwa dengan tingkat penetrasi 81,72%. Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa semakin banyak masyarakat, termasuk anak-anak, memiliki akses dan kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan digital.

Studi UNICEF (2025) menunjukkan bahwa tingginya keterhubungan anak dengan internet

belum diikuti kesiapan yang memadai untuk menjaga keamanan diri di ruang digital. Hanya 37,5% anak yang menerima informasi mengenai cara menjaga keamanan saat daring. Pada saat yang sama, 42% anak merasa tidak nyaman atau takut akibat pengalaman mereka di ruang digital, sementara 50,3% pernah melihat gambar seksual di media sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa intensitas interaksi digital juga meningkatkan peluang anak terpapar berbagai risiko ketika kemampuan mengenali dan mengantisipasinya masih terbatas.

Mengenai kebiasaan daring anak di Indonesia, kajian UNICEF menunjukkan bahwa 99,4% anak menggunakan internet, dengan rata-rata waktu penggunaan mencapai 5,4 jam per hari. Intensitas tersebut membuka peluang pembelajaran, komunikasi, dan hiburan, tetapi sekaligus meningkatkan eksposur terhadap risiko digital. Rendahnya literasi keamanan digital dapat menyebabkan anak kurang mampu melindungi data pribadi, mengenali konten atau perilaku berisiko, serta menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi ancaman.



Penggunaan Telepon Seluler dan Akses Internet Anak Usia Dini di Indonesia



DIRINCI PER KELOMPOK USIA (Persen)

KELOMPOK USIA	MENGUNAKAN TELEPON SELULER	MENGAKSES INTERNET
Di bawah usia 1 tahun	5,88%	4,33%
Usia 1-4 tahun	37,02%	33,80%
Usia 5-6 tahun	58,25%	51,19%

Mengutip data penggunaan perangkat seluler dan akses internet dari artikel Komdigi (2025) menunjukkan bahwa penggunaan perangkat digital telah menjangkau anak sejak usia dini dan meningkat seiring bertambahnya usia. Kondisi tersebut menegaskan bahwa literasi, pendampingan, dan perlindungan digital perlu dibangun sejak awal perkembangan anak. Permasalahan keamanan anak di ruang digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan anak,

tetapi juga kesiapan ekosistem yang melindunginya. Orang tua masih menghadapi keterbatasan dalam pendampingan digital, sekolah belum optimal mengintegrasikan literasi digital dalam pembelajaran, dan platform digital perlu memperkuat fitur perlindungan anak. Pemerintah telah memperkuat kerangka perlindungan melalui PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Pada 2026, pemerintah juga menerbitkan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan. Namun, penguatan regulasi dan pembatasan akses saja belum cukup. Tantangannya adalah memastikan anak dan orang tua memiliki kapasitas untuk memahami risiko, memanfaatkan fitur perlindungan, serta mengetahui mekanisme pelaporan dan pertolongan.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara tingginya keterhubungan anak dengan teknologi dan kapasitas mereka untuk menggunakannya secara aman. Penguatan kompetensi literasi digital anak dan orang tua perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk melengkapi kebijakan regulatif sekaligus memperkuat kapasitas perlindungan dalam keluarga.



Ketika Anak Tumbuh di Balik Layar: Sudahkah Mereka Aman?

Menjaga anak di ruang digital tak cukup dengan pembatasan. Edukasi digital perlu bergeser dari larangan menuju kemampuan mengenali risiko dan melindungi diri di balik layar.

AyoBandung.id / Sep 1

2. Deskripsi Masalah

Pesatnya keterhubungan dengan internet telah memperluas paparan anak terhadap konten yang tidak sesuai usia, perundungan siber, eksploitasi, penyalahgunaan data pribadi, serta kekerasan dan eksploitasi seksual secara daring. Studi *Disrupting Harm in Indonesia* (2022) memperkirakan sekitar 2% anak pengguna internet mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual secara daring (*Online Child Sexual Exploitation and Abuse/OCSEA*) dalam 12 bulan terakhir, atau setara dengan lebih dari setengah juta anak setiap tahun.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital merupakan bagian dari agenda prioritas perlindungan anak dan pembangunan kualitas SDM. Persoalan kebijakan tidak semata-mata terletak pada tingginya penggunaan internet atau keberadaan regulasi, tetapi pada efektivitas implementasi perlindungan di tingkat pengguna.

Regulasi tidak akan memberikan perlindungan optimal apabila anak belum memiliki kemampuan mengenali risiko dan mengambil keputusan aman, orang tua belum memiliki kapasitas pendampingan digital yang memadai, sekolah belum memberikan pendidikan literasi digital secara sistematis, dan Penyelenggara Sistem Elektronik (SPE) belum sepenuhnya menghadirkan mekanisme perlindungan sesuai ketentuan.

2.1. Penetapan Isu Prioritas dengan USG

Untuk menentukan isu yang membutuhkan intervensi kebijakan, digunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) terhadap empat pokok permasalahan: (1) rendahnya literasi digital anak dan orang tua; (2) implementasi perlindungan anak dalam regulasi dan tata kelola

No	Isu	Skor	Prioritas
1	Rendahnya literasi digital anak dan orang tua	15	1
2	Regulasi dan implementasi perlindungan	13	2
3	Koordinasi antarpemangku kepentingan	12	3
4	Fitur keamanan platform	11	4

platform digital; (3) lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan; dan (4) belum optimalnya fitur keamanan yang ramah anak pada *platform* digital. Hasil USG menempatkan rendahnya literasi digital anak dan orang tua sebagai isu prioritas. Penetapan ini menunjukkan bahwa kapasitas

pengguna merupakan titik intervensi strategis karena berhadapan langsung dengan risiko digital sehari-hari. Literasi digital tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan teknis menggunakan perangkat saja. Literasi keamanan digital mencakup kemampuan menilai informasi, menjaga privasi, mengenali risiko, mengelola interaksi, menggunakan fitur perlindungan, melaporkan masalah, dan mencari pertolongan.

2.2. Fishbone Analysis

Fishbone Analysis digunakan untuk memetakan faktor penyebab yang membentuk rendahnya literasi dan kompetensi keamanan digital. Hasil pemetaan menunjukkan lima kelompok faktor yang saling berkaitan, yaitu :

- **Individu**, yaitu keterbatasan kemampuan anak dalam menilai kredibilitas informasi, mengenali risiko, menjaga privasi, dan merespons ancaman, sebagian orang tua juga belum memahami perkembangan teknologi dan risikonya.
- **Keluarga**: aturan penggunaan gawai belum konsisten, pendampingan masih lemah, dan terdapat kesenjangan pengetahuan digital antara anak dan orang tua.
- **Lingkungan dan akses**: terdapat perbedaan kemampuan memperoleh informasi, pendidikan literasi digital, dan dukungan perlindungan di berbagai wilayah.
- **Pendidikan**: literasi dan keamanan digital belum optimal terintegrasi dalam pembelajaran dan kapasitas pendidik belum merata.
- **Teknologi**: desain dan fitur perlindungan platform belum selalu sederhana, proaktif, dan ramah anak.

2.3. Analisis Akar Masalah

Pemetaan *Fishbone* memperkuat bahwa rendahnya literasi digital merupakan masalah sistemik. Anak dapat memiliki kemampuan teknis menggunakan media digital, tetapi belum tentu memiliki kompetensi keamanan untuk menilai informasi, melindungi data pribadi, mengelola interaksi, mengenali manipulasi atau eksploitasi, dan mencari pertolongan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara *digital skills* dan *digital safety competencies*. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa intervensi tidak berhenti pada gejala, dilakukan Analisis Akar Masalah. Hasilnya menunjukkan lima penyebab strategis, yaitu:

1. Pengetahuan dan keterampilan keamanan digital belum dimiliki secara merata.
2. Edukasi keamanan digital belum menjadi bagian yang sistematis dan berkelanjutan dalam keluarga dan sekolah. Sistem edukasi masih cenderung berupa kampanye atau sosialisasi.
3. Kapasitas orang tua, guru, dan institusi pendukung belum berkembang secepat perubahan teknologi dan pola risiko digital.
4. Penguatan literasi digital belum sepenuhnya dibangun sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak, hubungan antara pendidikan, pengasuhan, keamanan *platform*, mekanisme pelaporan, dan layanan perlindungan yang belum terintegrasi.
5. Belum terbentuknya ekosistem literasi dan perlindungan digital anak yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis pembagian peran yang jelas antara pemerintah, sekolah, keluarga, termasuk penyedia *platform* digital.

2.4. Rumusan Masalah dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan rangkaian analisis USG, *Fishbone*, dan Analisis Akar Masalah, persoalan kebijakan utama yang dirumuskan adalah belum optimalnya kapasitas pengguna dan ekosistem pendukung yang memungkinkan anak menggunakan ruang digital secara aman, sehat, dan sesuai tahap perkembangannya. Masalah tersebut memiliki tiga akar strategis yang dapat menjadi target sasaran intervensi:

- (1) penguatan kapasitas anak, orang tua, dan guru;
- (2) penguatan ekosistem pendidikan dan pengasuhan digital; dan
- (3) penguatan tata kelola serta kolaborasi perlindungan anak di ruang digital.

Dengan fakta kerangka regulasi perlindungan anak di ruang digital telah diperkuat, intervensi kebijakan perlu bergeser dari pendekatan yang hanya berorientasi pada regulasi menuju pendekatan yang memperkuat kapasitas pengguna dan ekosistem. Literasi keamanan digital harus diposisikan sebagai kompetensi perlindungan yang dibangun secara berkelanjutan melalui keluarga dan sekolah, serta dihubungkan dengan mekanisme perlindungan dan pelaporan.

3. Alternatif Solusi

Berdasarkan akar masalah dirumuskan lima alternatif solusi strategi kebijakan. Kelima alternatif secara implmentatif tidak berdiri sendiri, tetapi merepresentasikan titik intervensi yang berbeda dalam ekosistem perlindungan anak digital.

Tabel 1. Alternatif Strategi Kebijakan

No.	Alternatif Solusi	Arah Kebijakan
1.	Penguatan Literasi dan Kompetensi Keamanan Digital Anak Berbasis Keluarga dan Sekolah	Fokus pada penguatan kompetensi keamanan digital yang praktis dan sesuai usia agar anak, orang tua, dan guru mampu mengenali risiko, melindungi diri, serta merespons dan melaporkan masalah di ruang digital melalui pembelajaran, penguatan kapasitas guru, dan <i>digital parenting</i> .
2.	Pembangunan Ekosistem Digital Parenting Terintegrasi	Alternatif ini menempatkan keluarga sebagai garda depan perlindungan digital anak, didukung sekolah dan pemerintah melalui standar kompetensi orang tua, panduan pengasuhan dan pengaturan gawai berbasis usia, edukasi <i>parental control</i> , serta layanan pendampingan.
3.	Sekolah sebagai Pusat Ekosistem Perlindungan Digital Anak	Intervensinya mencakup <i>digital safety curriculum</i> , penguatan peran guru sebagai <i>digital safety facilitator</i> , deteksi dini dan pelaporan risiko, integrasi dengan layanan BK, serta pelibatan orang tua secara berkala.
4.	Tata Kelola Perlindungan Anak Digital Terintegrasi dan Kolaboratif	Fokus pada penguatan koordinasi dan kejelasan peran antarpemangku kepentingan melalui mekanisme koordinasi lintas sektor, standar peran, sistem rujukan, pemantauan, dan kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, serta PSE
5.	Sistem Perlindungan Digital Anak Berbasis Teknologi dan Risiko	Alternatif ini berfokus pada penguatan perlindungan anak melalui teknologi, meliputi <i>age assurance</i> , <i>parental control</i> , privasi bawaan, pelaporan, deteksi risiko, dan pemantauan <i>platform</i> . Alternatif ini mendukung implementasi PP TUNAS, tetapi membutuhkan kesiapan teknologi, tata kelola, sumber daya, dan pengawasan yang kuat

Berdasarkan analisis, alternatif pertama menjadi rekomendasi utama yang dipilih. Pada alternatif pertama sudah mencakup dukungan capaian arah kebijakan pada alternatif kedua dan ketiga karena di dalamnya ada orang tua, guru, pembelajaran, dan *digital parenting*.

Alternatif terpilih ini paling sesuai dengan isu prioritas hasil USG, *Fishbone*, dan Analisis Akar Masalah. Intervensinya pun relatif mudah diintegrasikan dengan program yang telah berjalan dan tidak memerlukan pembangunan sistem teknologi atau kelembagaan baru dalam skala besar. Bahkan dalam jangka panjang alternatif terpilih bisa menjadi fondasi tercapainya alternatif kebijakan nomor keempat dan kelima.

4. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan utama yang diajukan dalam *policy brief* ini adalah memperkuat kapasitas anak dan orang tua, sekaligus menjangkau lingkungan sekolah dengan menggeser dari kegiatan sosialisasi menuju pembentukan kompetensi dengan pendekatan integratif yang menjadikan kompetensi sebagai entry point penanganan masalah keamanan digital

AYO NETIZEN

Sekolah, Gerbang Perlindungan Anak di Ruang Digital

7 menit baca

Perlindungan anak di ruang digital tidak cukup berhenti pada literasi digital. Sekolah harus memiliki kapasitas dan...

AyoBandung.id / Sep 9



Ditulis oleh Bayu Hikmat Purwana diterbitkan Rabu 09 Sep 2026, 13:27 WIB



5. Strategi Implementasi

Tahap 1:

Penguatan kebijakan dan standar dengan diawali dengan penyusunan kerangka kompetensi, pedoman, dan modul keamanan digital berbasis usia oleh Komdigi bersama Kemendikdasmen, dan KPPPA, yang kemudian disesuaikan implementasi teknisnya oleh Dinas Pendidikan di tingkat daerah.

Tahap 2:

Penguatan kapasitas sekolah dengan memfasilitasi pelatihan guru dan program Orang Tua Tanggap Digital yang berfokus pada kemampuan praktis, mulai dari pengenalan risiko, privasi data, hingga fitur pelaporan.

Tahap 3:

Integrasi di Sekolah dan Keluarga diwujudkan melalui pembiasaan materi keamanan digital dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)/ Bimbingan dan Konseling (BK), penyediaan mekanisme deteksi di sekolah, serta pemanfaatan *parental control* di rumah.

Keberhasilan strategi implementasi kebijakan diukur melalui capaian *output* dan *outcome*. Capaian *output* dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Matriks Capaian Output

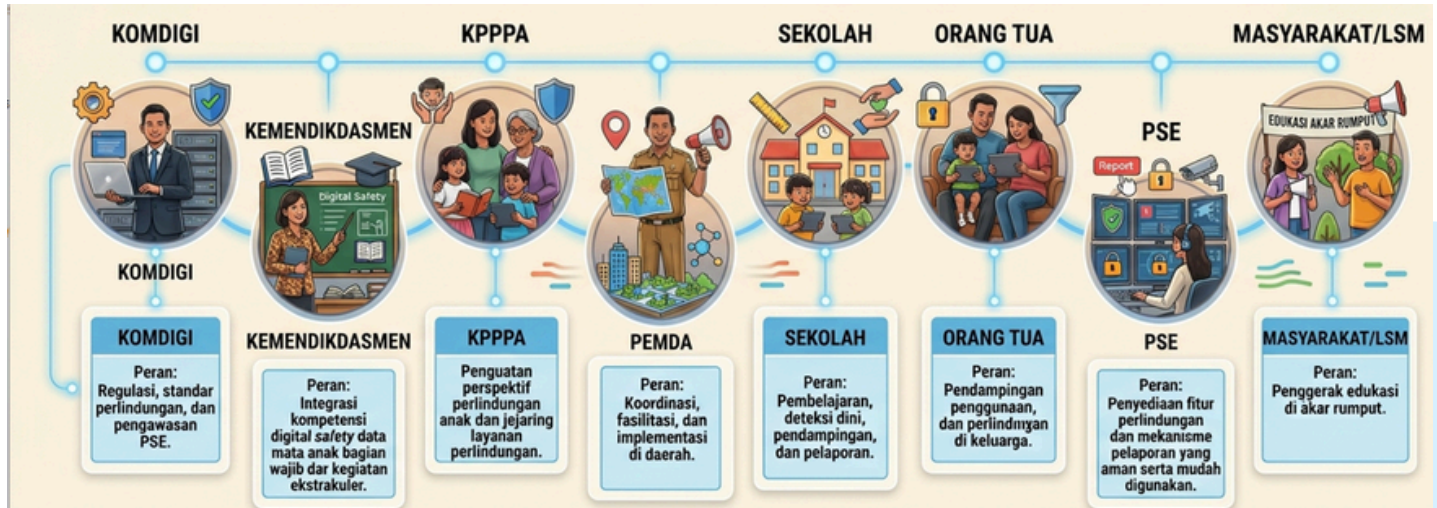
Komponen	Intervensi Utama	Output
Kompetensi anak	Standar kompetensi dan modul keamanan digital berbasis usia	Kecakapan mengenali resiko, menjaga privasi, dan merespons ancaman
Kapasitas orang tua	Program orang tua tanggap digital dan digital parenting	Kemampuan pendampingan dan penggunaan <i>parental control</i>
Kapasitas guru	Pelatihan dan penguatan guru sebagai <i>digital safety facilitator</i>	Kemampuan edukasi, deteksi dini, dan respons risiko
Sekolah	Integrasi keamanan digital dalam KBM dan BK	Pembelajaran dan mekanisme rujukan risiko yang sistematis
Pelaporan	Penguatan pemahaman kanal pelaporan dan rujukan	Anak/orang tua mengetahui cara mencari bantuan

Target *outcome* dirumuskan dengan target tingkat penurunan kerentanan anak terhadap risiko digital dan penguatan ekosistem perlindungan yang aman, adaptif, dan terintegrasi.

Indikator utamanya meliputi:

- (1) peningkatan kompetensi keamanan digital anak;
- (2) peningkatan kemampuan orang tua melakukan pendampingan;
- (3) peningkatan kapasitas guru mengenali dan merespons risiko;
- (4) peningkatan pemanfaatan fitur perlindungan, pelaporan serta tindak lanjutnya.

Untuk mendukung pencapaian *output* dan *outcome* dari tiga tahap strategi implementasi tersebut dipetakan aktor dan peran aktor yang dilustrasikan berikut ini:



DAFTAR REFERENSI

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, February 7). APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital>
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2026). Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). Kemkomdigi Apresiasi Kepatuhan Meta, Pemberian Sanksi Bagi Platform Digital Lain. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kemkomdigi-apresiasi-kepatuhan-meta-pemberian-sanksi-bagi-platform-digital-lain>
- UNICEF. (2022). Disrupting Harm country reports. Evidence on online child sexual exploitation and abuse. <https://www.unicef.org/innocenti/reports/disrupting-harm-country-reports>

Penulis,
Dr. Bayu Hikmat Purwana, M.Pd
(Analisis Kebijakan Ahli Madya, Pusjar SKTAN LAN Jatinangor)